

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPKP) PADA UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) LESTARI BINTAN  
KABUPATEN BINTAN**

**SKRIPSI**

**FITRIA DWI FAJRIYATI**

NIM : 14622256



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2021**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPKP) PADA UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) LESTARI BINTAN  
KABUPATEN BINTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**FITRIA DWI FAJRIYATI**

NIM : 14622256



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN**

**TANJUNGPINANG**

**2021**

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPKP) PADA UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) LESTARI BINTAN  
KABUPATEN BINTAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Fitria Dwi Fajriyati

NIM : 14622256

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

**Andry Tonnaya, S.E.,M.Ak**

NIDN. 8823900016/Asisten Ahli

**Rachmad Chartady, S.E.,M.Ak**

NIDN. 1023049101/Asisten Ahli

Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Hendy Satria, S.E., M.Ak**

NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPKP) PADA UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) LESTARI BINTAN  
KABUPATEN BINTAN**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Fitria Dwi Fajriyati  
NIM : 14622256

Telah dipertahankan didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

**Andry Tonnaya, S.E., M.Ak**  
NIDN. 8823900016/Asisten Ahli

**Hendy Satria, S.E., M.Ak**  
NIDN. 1015069101/Lektor

Anggota,

**Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak**  
NIDN. 1028117701 /Asisten Ahli

Tanjungpinang, 02 Februari 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  
Ketua,

**Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak., CA**  
NIDN. 1029127801/Lektor

## **PERNYATAAN**

Nama : Fitria Dwi Fajriyati  
NIM : 14622256  
Tahun Angkatan : 2014  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.18  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Februari 2021  
Penyusun

**Fitria Dwi Fajriyati**  
NIM. 14622256

# MOTTO

*“Musuh yang Paling Berbahaya di atas Dunia Ini Adalah Penakut dan Bimbang.  
Teman yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian dan Keyakinan yang Teguh”*

*(Andrew Jackson)*

*" Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah  
jatuh " (Hamka)*

*“Dengan ilmu kita menuju kemuliaan” (Ki Hajar Dewantara)*

*“Kecerdasan dan karakter adalah tujuan nyata sebuah pendidikan.”*

*“If you are grateful, I will surely increase you (in favor).*

*Jika kamu bersyukur, Maka akan aku tambah nikmat Ku (Allah) kepadamu”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alamiin...*

*Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi ini bisa selesai. Tak lupa pula salawat beriring salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan.*

*Ya Allah... Se izinmu ku berhasil melewati satu rintangan untuk sebuah keberhasilan. Namun kutahu keberhasilan bukanlah akhir dari perjuanganku tapi awal dari sebuah harapan dan cita-cita. Jalan didepanku masih panjang, masih jauh perjalananku untuk menggapai masa depan yang cerah tuk bisa membahagiakan orang-orang yang kucintai.*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh –sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap”.(Qs.Al-Insyirah; 7-9).*

*Dengan segenap kasih sayang dan diiringi do'a yang tulus skripsi ini penulis persembahkan kepada :*

- 1. Samsul Fajar (Ayah)*
- 2. Ooy Ruhyan (Ibu)*
- 3. Herlanda Sofyan (Suami)*
- 4. Putri Rahmadayanti (Teman)*

*Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna. Hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai, mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur tercurah kehadirat Allah SWT karna berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang menghantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintang". Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini sehingga selesai, yakni ;

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak., M.Si.,CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak Andy Tonnaya, SE., M.Ak selaku pembimbing I yang telah memberikan ilmu, saran, nasehat, waktu, dan bimbingannya sehingga apa yang diberikan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rachmad Cartady SE., M.Ak selaku pembimbing II yang selalu teliti dan sabar serta meluangkan waktu untuk penulis sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Para Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam bidang keadministrasian selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Ketua UPK Kecamatan Teluk Bintan Bapak Yunus, S.Pd., Staff Pengguliran UPK Kecamatan Teluk Bintan Bapak Joni Iskandar.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT Aamiin allahumma aamiin.

Tanjungpinang, Februari 2021  
Penulis

Fitria Dwi Fajriyati

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kegunaan Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Akuntabilitas .....	9
2.2 Akuntansi Sektor Publik .....	11
2.3 Akuntabilitas Sektor Publik .....	13
2.4 Organisasi Sektor Publik .....	17
2.5 Dana Bergulir .....	18
2.6 Pengelolaan .....	22
2.7 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang .....	24
2.8 Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) .....	28
2.9 Penelitian Terdahulu .....	31

	2.10 Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	3.1 Jenis Penelitian .....	36
	3.2 Jenis Data .....	37
	3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	38
	3.4 Teknik Pengolahan Data .....	43
	3.5 Teknik Analisis Data .....	43
	3.7 Lokasi Penelitian .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1 Hasil Penelitian .....	45
	4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
	4.1.2 Visi Dan Misi UPK Lestari Bintang .....	48
	4.1.3 Struktur Organisasi UPK Lestari Bintang .....	48
	4.1.4 Kegiatan-kegiatan UPK Lestari Bintang .....	52
	4.2 Pembahasan .....	53
	4.2.1 Pengembangan UPK Lestari Bintang Sebagai Lembaga Usaha .....	53
	4.2.2 Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam .....	54
	4.2.3 Pembukuan Keuangan UPK Lestari Bintang .....	56
	4.2.4 Alokasi Dana UPK Lestari Bintang .....	61
	4.2.5 Laporan Penggunaan Dana UPK Lestari Bintang .....	64
	4.2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Dana UPK Lestari Bintang .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	66
	5.2 Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**CURICULUM VITAE**

## **ABSTRAK**

Fitria Dwi Fajriyati, 14622256

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintang**

Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Bergulir, Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana bergulir SPKP pada UPK Lestari Bintang Kabupaten Bintang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah UPK Lestari Bintang membuat beberapa laporan keuangan seperti laporan perkembangan pinjaman, laporan kolektibilitas pinjaman, laporan realisasi penyaluran dana, laporan arus kas dan dana, serta laporan operasional.

Kesimpulan dari penelitian ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, UPK Lestari Bintang melaksanakan tanggung jawabnya yaitu memberikan pelaporan terhadap pengelolaan dana bergulir SPKP sebagai bentuk akuntabilitas pelaporan yang kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  
Januari 2021 (69 Halaman + 7 Gambar + 16 Lampiran)

Referensi : 23 Buku, 6 Jurnal

Dosen Pembimbing I : Andry Tonnaya, SE.,M.Ak

Dosen Pembimbing II : Rachmad Cartady, SE.,M.Ak

## **ABSTRACT**

Fitria Dwi Fajriyati, 14622256

### **Analysis of Accountability Management of Revolving Savings and Loan Funds for Women (SPKP) in the Sustainable Bintan Activity Management Unit (UPK), Bintan Regency**

*Keywords: Accountability, Revolving Fund, Savings and Loans for Women (SPKP)*

*The purpose of this study was to determine the accountability of the SPKP revolving fund management at UPK Lestari Bintan Bintan Regency.*

*This type of research used in this study uses qualitative research methods, where the author provides an explanation using analysis in the form of written or spoken words and considers the opinions of other people who can be referred to as sources. In this study, the types of data collected are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and documentation.*

*The results obtained in this study were UPK Lestari Bintan made several financial reports such as loan progress reports, loan collectibility reports, reports on the realization of disbursement of funds, cash and fund flow reports, and operational reports.*

*The conclusion of this research as a whole has gone well, UPK Lestari Bintan carries out its responsibility, namely providing reports on the management of the SPKP revolving fund as a form of reporting accountability which is then submitted to the Inter-village cooperation agency (BKAD).*

*Thesis of the School of Economics (STIE) Development in Tanjungpinang  
January 2019 (69 Pages + 7 Pictures + 16 Attachments)*

*References: 23 Books, 6 Journals*

*Supervisor I : Andry Tonnaya, SE., M.Ak*

*Supervisor II : Rachmad Cartady, SE.,M.Ak*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang tidak asing di Indonesia, penentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan dan pemerataan. Perencanaan serta pelaksanaan pembangunan tersebut akan berhasil secara maksimal apabila melibatkan masyarakat dengan berpartisipasi langsung dalam pembangunan.

Persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketidak merataan telah menjadi penghambat untuk menumbuhkan stabilitas dinamika sosial-ekonomi bangsa. Masyarakat yang terhimpit persoalan ekonomi dan sosial tersebut mengalami kesulitan akses terhadap pendidikan yang bermutu, ketidakmampuan membiayai kesehatan yang layak. Penyebab kemiskinan adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi serta tidak meratanya pertumbuhan tersebut. Maka solusinya adalah mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, dalam arti merata dan berkualitas (Wahid, 2014)

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) merupakan salah satu jenis kelompok pemanfaat dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Bentuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) yaitu memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) termasuk dalam kategori Dana Bergulir sehingga pengelolaan keuangan dilakukan di tingkat UPK atau Lembaga keswadayaan masyarakat penerima dana dengan menerapkan dasar-dasar akuntansi/ pembukuan sederhana serta pengendalian yang terdiri atas kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh proses dan tahapan kegiatan.

Pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang dipilih melalui musyawarah kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah. UPK menghasilkan laporan penggunaan dana sebagai bentuk pertanggung jawaban UPK, akuntabilitas kepada pemerintah atas dana yang digunakan dan disalurkan untuk masyarakat kemudian dibutuhkan laporan keuangan sebagai sumber informasi yang digunakan untuk menunjukkan arus dana bergulir UPK dari tahun ke tahun.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi terutama pada dana yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh UPK atas penggunaan dana sebagaimana (Sucipto, 2012) yang menunjukkan bentuk akuntabilitas UPK melalui pembukuan dana UPK.

Terwujudnya tujuan pemerintahan yang baik pun didukung melalui akuntabilitas penanggung jawab pelaksana kegiatan. Kemitraan sinergis antara negara dan masyarakat (*civil society*) dikedepankan dalam sistem demokrasi dengan pengelolaan yang efisien dan jauh dari korupsi (Nugroho, 2014) Mekanisme akuntabilitas pada pengelolaan dana program pengentasan kemiskinan perlu untuk dikelola dan diawasi dengan benar untuk menghindari permasalahan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Akuntabilitas merupakan bagian dari praktik akuntansi yang berperan dalam perubahan suatu organisasi. (Mardiasmo, 2009) mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab atau kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) kepada pihak pemberi amanah (*principal*) dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, memberikan pelaporan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan.

Tujuan Pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

terdapat mekanisme pokok yang secara langsung mengikutsertakan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian.

Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang merupakan salah satu lokasi program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang memperoleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan salah satunya adalah penambahan permodalan untuk kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP). Di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang terdapat 2 jenis kelompok pemanfaat pinjaman dana bergulir yaitu Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Adanya kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) tersebut dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi. Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) merupakan kegiatan bantuan pinjaman bergulir yang dikelola oleh suatu lembaga pemberdayaan yaitu Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga pengelola kegiatan antar desa. Kebijakan Program terkait dengan bangunan kelembagaan UPK setidaknya dapat dilihat dari 3 struktur kelembagaan yang berfungsi mengamankan 3 prinsip organisasi partisipatif, yakni status kepemilikan asset berada di tangan masyarakat, mekanisme partisipatif tetap terjaga, serta kewenangan para pihak dapat didefinisikan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemberian bantuan pinjaman dana bergulir sebagai modal usaha produktif bagi masyarakat merupakan upaya agar masyarakat miskin di perdesaan memiliki keinginan untuk dapat maju dengan membuat suatu jenis usaha atau untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki, sehingga dengan adanya pemberian bantuan pinjaman dana bergulir ini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara Periodik (Mardiasmo, 2003 dalam Winidyaningrum dan Rachmawati 2010). Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada *stakeholder*.

Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menunjukkan bagaimana realitas yang terjadi pada pelaporan UPK sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana bergulir pada program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang. Dan berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul **“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPKP) PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) LESTARI BINTAN KABUPATEN BINTAN”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintan?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya kegiatan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintan yang menyangkut tentang pengentasan masalah kemiskinan maka dalam penelitian ini aspek yang di kaji secara lebih mendalam adalah tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintang khusus nya pada kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP).

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan bagi masyarakat dan anggota Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sebagai bahan informasi yang berarti bagi kemajuan anggotanya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintang. Hasil penelitian ini diharapkan mendukung teori yang ada sebelumnya sehingga dapat mendorong atau sebagai bahan penelitian berikutnya serta sebagai masukan dan koreksi bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan usulan penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintang ini, maka penulis memaparkannya secara sistematis yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang Kabupaten Bintang khusus nya pada kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP).

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang di ambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang penulis teliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi**

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.

(Sumarsan, 2013) menjelaskan bahwa : Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi pada sebuah pengetahuan akan diketahui dengan dua istilah asing yaitu, *accountancy* dan *accounting*. Dari segi terminologi istilah itu diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi akuntansi. Untuk lebih mendekatkan arti dari kedua istilah diatas, perlunya mengetahui pengertian dan kedudukan atas masing-masing dalam pengetahuan akuntansi. Akuntansi (*accountancy*) adalah suatu metodologi dan sekumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi bagaimanapun bentuknya, terbagi menjadi dua bagian. Pertama, *accounting* merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan proses terlaksananya pembukuan dalam arti yang luas.

Kedua, auditing merupakan sebuah pengetahuan atau ilmu yang berhubungan dengan suatu pemeriksaan dan menilai (evaluasi) atas hasil dari proses dari pembukuan tersebut. Karena, nama akuntansi (*accountancy*) lebih lebar meliputi bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktik, serta pemeriksaan dan penilaian. Sedangkan istilah accounting hanya menunjukkan bidang teori.

Akuntansi juga merupakan suatu ilmu yang di dalamnya berisi bagaimana proses pemikiran sehingga dihasilkan suatu kerangka konseptual yang mencakup prinsip, standar, metode, dan teknik, serta prosedur yang akan dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan dan informasi-informasi lainnya untuk melaporkan keadaan keuangan dari suatu kesatuan usaha.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

## 2.2 Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Tujuan Akuntansi Sektor Publik yaitu :

1. *Management Control*, tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan / dianggarkan untuk sebuah organisasi
2. *Accountability*, tujuan ini hampir sama dengan management control yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sumber daya / bidang / divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana / anggaran publik.

Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik.

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut (Bastian, 2010) adalah sebagai berikut “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Kehadiran akuntansi sektor publik dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung yang membantu pembentukannya. Faktor pertama yang mempengaruhi adalah sistem pemerintahan. Di Indonesia sendiri sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem demokrasi parlementer. Sistem akuntansi sektor publik diterapkan dengan pengaruh dari lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif yang berada dalam kondisi check and balances. Faktor kedua yang ikut serta mempengaruhi adalah sifat sumber daya yang tidak berkaitan langsung dengan hasil. Kemudian faktor terakhir yang ikut mempengaruhi adalah kondisi politik negara yang dapat menimbulkan negosiasi antara lembaga pemerintah dan legislatif.

Kehadiran dari akuntansi sektor publik juga dapat mewujudkan karakteristik dari *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Karakteristik tersebut terdiri dari berbagai hal, antara lain adalah:

1. *Transparency*, karakter yang diwujudkan dari adanya kebebasan dalam mendapatkan informasi.
2. *Participation*, karakter yang mewujudkan kebebasan dalam berasosiasi, berbicara, dan berpartisipasi dengan konstruktif.

3. *Accountability*, karakter yang berasal dari pertanggung jawaban yang real terhadap publik.
4. *Consensus Orientation*, karakter yang memiliki orientasi pada publik.
5. *Rule of law*, karakter yang bertujuan untuk mewujudkan hukum yang dapat ditegakkan tanpa memandang apapun.
6. *Equity*, karakter ini bertujuan untuk mewujudkan persamaan dari hak keadilan dan kesejahteraan.
7. *Responsiveness*, karakter yang berwujud dikap cepat dan tanggap terhadap pelayanan publik. (baca juga: Prinsip-Prinsip Akuntansi)
8. *Strategic Vision*, karakter yang mewujudkan visi dan misi yang ada dan jelas.
9. *Efficiency and Effectiveness*, karakter yang mewujudkan pengelolaan dari sumber-sumber daya mulai dari pengumpulannya hingga penggunaan sumber daya tersebut dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Menurut (Halim, 2012) Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

### **2.3 Akuntabilitas Sektor Publik**

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal

ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Dalam bidang Ilmu Akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah tanggungjawab atau diartikan sebagai pertanggungjawaban. Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan

instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blamewortiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*), termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik, (Rizal, 2014)

Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Rizal, 2014) mengatakan bahwa ciri pemerintahan yang akuntabel adalah:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat,
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat,
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik,
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta
5. Sebagai sarana, bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut (Kusumastuti, 2014) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan

menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut :

1. Luas kewenangan dan rentang kendali (*span of control*) organisasi.
2. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable*) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.

Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya.

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Akuntabilitas di bangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau (Martha, 2014)

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Jadi dalam penelitian ini menggambarkan tingkat pertanggungjawaban lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

#### **2.4 Organisasi Sektor Publik**

Organisasi sektor publik mempunyai banyak aspek dimana salah satunya adalah keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik telah memiliki peranan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi sektor publik. Ini berarti perubahan manajemen keuangan publik yang dilakukan selama ini telah mampu meningkatkan daya tahan dan daya saing organisasi sektor publik.

Organisasi sektor publik ialah organisasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi publik adalah organisasi yang dipegang oleh pemerintah yang di bentuk untuk jalur utama antara program pemerintah dan masyarakat (Nordiawan, 2010) Keberadaan organisasi sektor publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi-kondisi berikut:

- a. Organisasi sektor publik merupakan penyedia barang publik (public goods).
- b. Organisasi sektor publik diperlukan dalam rekayasa struktur sosial.

Berdasarkan pemahaman atas sektor publik dan kondisi-kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/ atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Organisasi sektor publik memiliki ciri-ciri:

- a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu .
- b. Dimiliki secara kolektif oleh publik.
- c. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang diperjual belikan.

## **2.5 Dana Bergulir**

Pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok- kelompok masyarakat. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Kegiatan pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk :

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;

3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok peminfaat.

Manfaat dana bergulir dinilai dari nilai elastisitas dampak dana bergulir terhadap pendapatan total. Tujuan akhir dari dana bergulir adalah meningkatkan pendapatan program simpan pinjam khusus perempuan.

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah :

1. Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.

Sasaran fungsi kelompok dalam melayani peminfaat dana bergulir dibedakan menjadi :

1. Kelompok Chanelling (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada peminfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.

2. Kelompok Executing (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut:

1. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir

Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah program. Penyediaan dana permodalan tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga BLM telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomisili pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat keluar lokasi wilayah. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat bukan menggunakan dana untuk menjalankan suatu usaha pada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan oleh UPK.

2. Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM.

Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh RTM yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal.

### 3. Pelestarian Prinsip Pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM – Mandiri Perdesaan.

### 4. Pelestarian Kelembagaan

Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM – Mandiri Perdesaan seperti: UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

### 5. Pengembangan Kelompok

Dalam pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM. Misalnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian

Penyaluran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas. Pengeluaran pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang- investasi non permanen- dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.

## 2.6 Pengelolaan

Pengertian pengelolaan di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Pratama, 2012)

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan merupakan terjemahan dari kata *manajement* (Bahasa Inggris). Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, Istilah Inggris tersebut lalu menjadi Manajemen atau menejemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan , mempunyai 4 pengertian, yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Balderton dalam (Adisasmita, 2011), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha

manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

(Torang, 2016) membagi empat fungsi dasar pengelolaan, yaitu: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Fungsi-fungsi dasar tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja.

Selanjutnya (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Maka maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap pengelolaan dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

## **2.7 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang**

PNPM Mandiri bertanggungjawab untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, perkotaan serta wilayah khusus dan desa tertinggal. Namun dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan pengelolaan anggaran desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah berakhir menjadi pengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saat ini seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat berada dibawah tanggung jawab UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang menjadi salah satu agen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di kecamatan dan membantu BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan.

Tugas dan tanggung jawab UPK diantaranya adalah :

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana bergulir.
- b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP).
- c. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.

- d. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP).
- e. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD.
- f. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
- g. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP).

UPK (Unit Pengelola Kegiatan) harus tetap menjadi lembaga keuangan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, dalam hal ini UPK wajib untuk lebih bisa terus membuat terobosan guna tetap bisa menjadi pilihan utama para pemanfaat yang selama ini telah setia memanfaatkan dana yang bergulir di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tersebut. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) harus terus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, sehingga segala kegiatan yang berlangsung dapat dilaporkan secara terbuka dan transparan. Dengan adanya komunikasi yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih terkait pemanfaatnya/tidak ada yang merasa dirugikan.

Hal ini menjadi sinergi UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang berfokus dalam pengembangan ekonomi di pedesaan melalui pemberian perguliran modal usaha dengan sistem kelompok dan tentunya tanpa agunan (jaminan). Dengan

sistem tanpa agunan ini, ternyata memiliki dampak negatif yaitu telah banyak pengurus kelompok yang mulai nakal dengan menyalahgunakan dana pinjaman bergulir dan dana usaha ekonomi produktif hingga ratusan juta rupiah. Selain itu banyak juga anggota yang mulai bermasalah dalam kegiatan pinjaman, dimana mereka sering bermasalah dalam pembayaran angsuran peminjaman dana di UPK. Untuk itu perlu dibuatkan/disepakati aturan yang tegas dan jelas dalam Musyawarah Antar Desa Sehingga bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan dana pinjaman bergulir yang dilakukan oleh para ketua kelompok / anggota kelompok.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga pengelola kegiatan antar desa. Kebijakan Program terkait dengan bangunan kelembagaan UPK setidaknya dapat dilihat dari 3 struktur kelembagaan yang berfungsi mengamankan 3 prinsip organisasi partisipatif, yakni status kepemilikan asset berada di tangan masyarakat, mekanisme partisipatif tetap terjaga, serta kewenangan para pihak dapat didefinisikan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur kelembagaan UPK dibangun melalui 3 strategi yaitu:

- a. Penguatan aspek fungsional organisasi melalui perumusan, penyusunan, penetapan SOP UPK secara partisipatif
- b. Penguatan aspek aturan dasar organisasi melalui perumusan, penyusunan, penetapan statuta UPK secara partisipatif dalam kerangka organisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- c. Penguatan payung hukum UPK melalui fasilitasi produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun penetapan SK Kepala Daerah.

Dengan 3 strategi ini maka bangunan kelembagaan UPK dapat menjawab kebutuhan fungsi dan struktur sekaligus, artinya dengan strategi ini tujuan yang ingin dicapai melalui 3 prinsip organisasi partisipatif dapat diwujudkan. Hal yang berkaitan dengan penetapan peraturan UPK pada dasarnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan 3 prinsip dasar yaitu :

- a. Aspek Filosofis; menggambarkan nilai program PNPM Mandiri Perdesaan yang telah terinternalisir dalam organisasi UPK dan masyarakat misalnya akuntabilitas, partisipasi, kerjasama, transparansi, sejauh mana daya pelebagaannya. Argumentasi yang dibangun harus membuktikan bahwa kebutuhan peraturan UPK memenuhi aspek filosofis itu.
- b. Aspek Yuridis; ketentuan peraturan yang menjadi acuan, sekalipun mempunyai kewenangan pembuatan (*yuridis formal*), seharusnya peraturan yang disusun memperhatikan isi peraturan (*yuridis material*) apakah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas, dan apakah peraturan lain yang berkaitan telah dimasukkan.
- c. Aspek Sosiologis; apakah peraturan telah disusun memperhatikan semua hal (terkait dengan kebijakan program) yang telah berjalan di masyarakat, situasi dan kondisi masyarakat, kesiapan masyarakat dalam menerima dan mengimplementasikan produk hukum baru. Hal ini merupakan kajian efektifitas kebutuhan produk hukum baru.

Kebijakan ini telah menjelaskan 2 aspek kelembagaan UPK, yakni aspek fungsional (melekat secara internal di UPK) dan aspek kelembagaan (payung hukum dan statuta) yang melekat pada organisasi Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD). Payung hukum UPK terkait dengan kebutuhan perlindungan dan pelestarian aset, sistem, serta manfaat layanan UPK bagi masyarakat. Kebijakan payung hukum UPK juga terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan serta sudah dijalankan di lapangan bahwa UPK adalah unit kerja pelaksana mandat BKAD. Payung hukum UPK diletakkan dalam kaitan kedudukan UPK yang secara organisatoris di bawah naungan organisasi kerja BKAD. Saat ini sebagian besar UPK telah dipayungi melalui produk hukum daerah.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang adalah unit yang mengelola operasional kegiatan dana bergulir pengganti PNPM di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Visi dari UPK Lestari Bintang adalah menjadikan UPK Lestari Bintang sebagai institusi keuangan micro pilihan masyarakat dengan mendayagunakan asset dana dari PNPM mandiri perdesaan untuk usaha ekonomi masyarakat. Sedangkan misi dari UPK Lestari Bintang yaitu memberdayakan masyarakat dengan menyediakan kesempatan dan dukungan agar berhasil di sektor usaha mikro dan kecil dan memberikan pelayanan yang amanah dan professional.

## **2.8 Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP)**

Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) merupakan kegiatan pemberian pemodalannya untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

a. Tujuan Umum Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP)

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP)

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) merupakan salah satu kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan perempuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tambahan modal usaha ( Pedoman Umum PNPM Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007/2008). Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) termasuk dalam kategori dana bergulir sehingga pengelolaan keuangan dilakukan di tingkat UPK atau Lembaga keswadayaan masyarakat penerima dana dengan menerapkan dasar-dasar akuntansi/ pembukuan sederhana serta pengendalian yang terdiri atas kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh proses dan tahapan kegiatan.

a. Ketentuan Dasar Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP)

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- 2) Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### b. Ketentuan Pendanaan BLM

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) per kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM. Berikut adalah penjelasan sasaran, bentuk dan ketentuan kelompok SPKP:

- 1) Sasaran program, adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

2) Bentuk Kegiatan SPKP adalah memberikan dan pinjaman sebagai tambahan modal bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

c. Ketentuan Kelompok SPKP

1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.

2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.

3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.

4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.

5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

## **2.9 Penelitian Terdahulu**

1. Aswan Asqolani ( 2014 ) dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut : rata-rata pendapatan rumah tangga miskin setelah menjadi pemanfaat dari bantuan dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) PNPM Mandiri mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin sebelum menjadi

pemanfaat. Jumlah masyarakat rumah tangga miskin tahun 2014 mengalami penurunan dibanding jumlah masyarakat rumah tangga miskin tahun 2013.

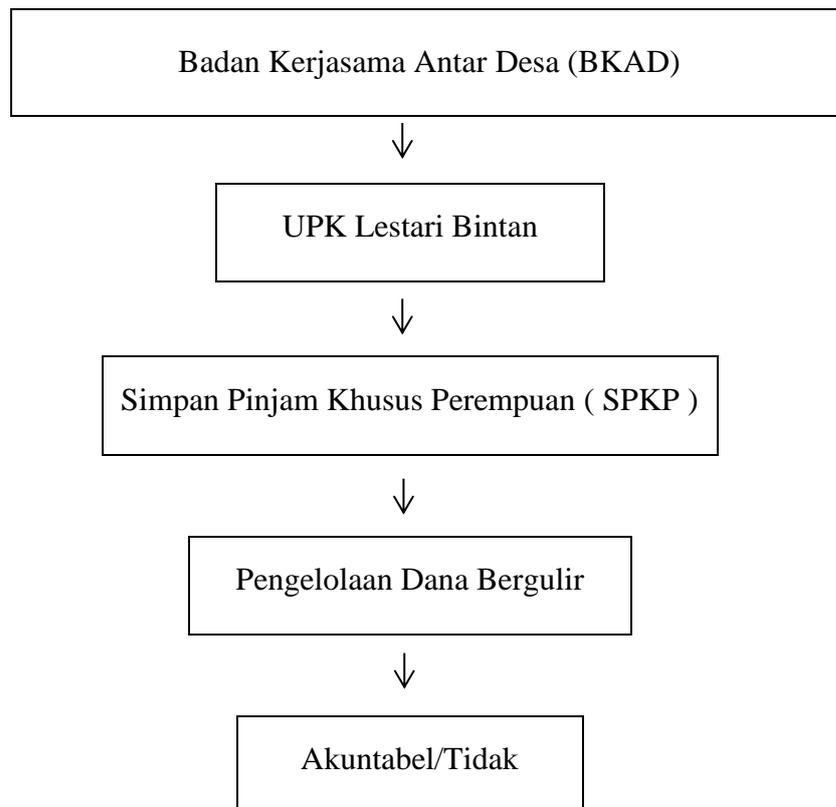
2. Sinta Oktavia ( 2011 ) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi Kasus pada Kelompok Wanita Cempaka Putih, Sungai Liku Tengah, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana SPP pada kelompok Cempaka Putih belum terkelola dengan baik. Dimana belum adanya sinergi yang baik (saling mendukung) antara pihak pemberi dana (PNPM/UPK), kelompok pengelola dana, dan pengguna dana (peminjam). Begitupun halnya dengan persoalan yang terjadi pada kelompok pengelola, dimana penunggakan yang terjadi adalah sebesar 70,3 % (26 orang) dari 37 peminjam pada kelompok Cempaka Putih tidak terlepas dari kelemahan masing-masing pihak yang harusnya saling menjalankan peranannya serta saling bersinergi tersebut.
3. Syarifah Alawiyyah ( 2017 ) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK-G. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPK selalu menyiapkan laporan penggunaan dananya karena suatu keharusan sedangkan laporan keuangan hanya dibuat sebatas kebutuhan primer UPK dan hanya diberikan kepada pendamping. Laporan keuangan tidak diberikan kepada Sektap Kota sebagai pelaksana program kegiatan sehingga perkembangan dana UPK dari tahun ke tahun secara rinci tidak dapat diketahui oleh Sektap Kota. Sejauh ini program Gerbangmastaskin telah berperan memberdayakan

perekonomian masyarakat melalui perguliran dana simpan pinjam untuk usaha masyarakat.

4. *Onuorah, Anastasia Chi-Chi (2012) by title Accountability And Public Sector Financial Management In Nigeria.* Hasilnya dianalisis menggunakan alat statistik yang relevan. Temuan mengungkapkan bahwa tingkat akuntabilitas sangat buruk di Nigeria karena atribut aksesibilitas, kelengkapan, relevansi, kualitas, keandalan, dan pengungkapan informasi ekonomi, sosial dan politik yang tepat waktu tentang kegiatan pemerintah sama sekali tidak tersedia atau sebagian tersedia bagi warga negara. menilai kinerja pejabat publik yang sebagian besar adalah pemegang jabatan politik. Atas dasar itu, makalah ini merekomendasikan antara lain bahwa agar akuntabilitas berhasil dalam pengelolaan dana publik di Nigeria harus ada penurunan tingkat korupsi, peningkatan standar akuntansi dan audit sektor publik, legislator sebagai juara akuntabilitas dan merestrukturisasi komite rekening publik dan nilai uang harus diterapkan dalam menjalankan bisnis pemerintah.
5. *Rita Nengsih(2015) by title The Effectiveness Of Urban Independent Community Empowerment Program (PNPM) In Tackling Poverty In Indonesia.* Hasil yang dianalisis adalah Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat nasional (PNPM) dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dengan tiga jenis kegiatan utama yaitu prasarana, sosial dan ekonomi, lingkungan perkotaan yang secara umum dikenal dengan Tridaya. Para penerima manfaat berpendapat bahwa mereka terbantu dengan adanya program tersebut karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah

melalui program pemberdayaan masyarakat nasional (PNPM) secara bertahap telah meningkatkan ekonomi masyarakat bawah terlepas dari beberapa faktor yang menghambat kemajuan program.

### 2.10 Kerangka Pemikiran



Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang merupakan salah satu penerima dana APBN/APBD yang disalurkan melalui kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan dana yang disalurkan merupakan dana bergulir yaitu dana yang wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pelaksana mandat Badan Kerjasama Antar Desa memiliki pedoman atau standard operasional dan prosedur bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berdasar pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Dana

bergulir yang disalurkan kepada UPK Lestari Bintang merupakan dana yang wajib dilaporkan setiap bulannya kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai bentuk transparansi penggunaan dana.

Dan disini penulis bermaksud untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana dari kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) di UPK Lestari Bintang tersebut.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori.

(Sugiyono, 2010) Menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori (Sujarweni, 2015)

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai kegiatan terencana untuk menangkap praktik penafsiran responden dan informan terhadap dunia. Perlu disadari bahwa orang bertindak sejalan dengan tafsirnya terhadap benda, fenomena, atau masalah yang dihadapinya. Fakta dan kenyataan yang ada

belum dapat kita percaya, melainkan berguna hanya sejauh tafsir seseorang yang menggunakannya. Istilah kualitatif menunjukkan penekanan terhadap proses-proses dan makna-makna yang tidak diuji atau diukur dari segi kuantitas, intensitas atau frekuensi (Utopo, Ariesto Hadi dan Arief, 2010)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

### **3.2 Jenis Data**

Kegiatan penelitian sangat erat kaitannya dengan data. Keberadaan data dalam penelitian sangat diperlukan sebagai bahan baku informasi. Sehingga dari data yang dikumpulkan oleh peneliti maka objek penelitian dapat digambarkan secara spesifik. Menurut (Siyoto, 2015), data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni:

1. Data primer, yang dikumpulkan berbentuk hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber.
2. Data Sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan-informan utama, observasi dan dokumentasi pada dokumen-dokumen terkait pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan proses pengelolaan dana bergulir. Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data berguna untuk mendapatkan data yang akurat tentang objek penelitian. Menurut (Rumengan, 2010) pengumpulan data adalah aktivitas yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

#### **1. Wawancara**

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari adalah antara lain:

- a. Pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya.
- b. Responden selalu menjawab pertanyaan.
- c. Pewawancara selalu bertanya.

- d. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral.
- e. Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya.
- f. Pertanyaan panduan ini dinamakan interview guide.
- g. Wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.

Untuk melakukan wawancara, ada anggapan yang harus atau perlu dipegang yaitu:

- a. Bahwa subyek atau responden adalah yang paling tau tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa yang idinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah hal yang sebenar-benarnya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

(Sugiyono, 2014) mengatakan bahwa wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden nya sedikit/kecil.

Wawancara merupakan aktivitas tanya jawab antara pihak pencari data selaku pewawancara dengan responden secara bebas baik terstruktur maupun tidak

untuk mengetahui informasi secara luas mengenai objek penelitian. Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks (Sarosa, 2012)

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara ini yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan (Sugyiono, 2014)

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian tersebut. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penelitian ini lebih banyak menggunakan indra penglihatan dengan maksud terjun langsung melihat ke lapangan.

Sanger dalam (Anon, 2010) berpendapat bahwa observasi dapat dilakukan dengan melihat bukti yang dikumpulkan dan berusaha mencari yang signifikan dan tidak signifikan dari kumpulan bukti tersebut. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis,

dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkencana dalam (Suardeyasaki, 2010) adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.

Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Karena manusia memiliki sifat pelupa, maka diperlukan catatan-catatan (*check-list*), alat-alat elektronik seperti kamera, video dan sebagainya; lebih banyak menggunakan pengamat; memusatkan perhatian pada data-data yang relevan; mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat; menambah bahan persepsi mengenai objek diamati.

Alat bantu yang dipergunakan di dalam observasi antara lain, yaitu daftar riwayat kelakuan (*anecdotal record*); catatan berkala; daftar catatan (*check list*); rating scale, yaitu pencatatan gejala menurut tingkatannya; alat-alat optik elektronik. Tingkat kecermatan observasi sangatlah dipengaruhi oleh faktor prasangka dan keinginan observee; terbatasnya kemampuan pancaindra dan ingatan; terbatasnya wilayah pandang, yaitu kecenderungan observee menaruh perhatian dengan membandingkannya kepada kejadian lainnya; kemampuan observer dalam menangkap hubungan sebab akibat; kemampuan menggunakan alat bantu; ketelitian pencatatan; pengertian observer terhadap gejala yang diukur.

Kegiatan observasi tersebut antara lain memandang, melihat, mengamati objek sehingga memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan

gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Menurut (Sugiyono, 2013), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, misal LSM.

Metode dokumentasi Arikunto yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteleti.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengambilan catatan, arsip, data dari segala sumber.

### **3.4 Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik non statistic karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, mengingat data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata bukan angka, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Analisis non statistik, dilakukan jika datanya bersifat kualitatif, yaitu data yang bersifat deskripsi, kata-kata bukan angka. Fenomena yang nampak ditanyakan, dikejar, dan dikembangkan lewat wawancara mendalam lewat informen lain, wawancara lagi pada informen berikutnya sampai mendapatkan suatu tentang objek penelitian.

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, pentingnya pengolahan yaitu data yang telah terkumpul perlu diolah dahulu, tujuannya menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, dan menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi, kemudian dianalisis. Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penganalisaan terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemui dilaporan,

kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang telah penulis dapatkan untuk mengambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam melakukan teknik analisis data kualitatif penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan juga dilakukan secara terus menerus.

### **3.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang yang berada di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang. Dimana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lestari Bintang ini merupakan salah satu penerima manfaat dana bergulir yang hingga saat ini masih di gulirkan dan dimanfaatkan salah satunya adalah untuk modal peminjaman kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Anon. (2010). *Makalah Observasi*.  
<http://www.scribd.com/doc/39320404/makalah-observasi>. (12
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Kusumastuti, P. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik : tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Martha, W. (2014). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Dikota Bandung*.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan Edisi kelima*. PT Elex Media Komputindo.
- Pratama, A. B. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pustaka Media Press.
- Rizal, D. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi. Edisi 1*. Semesta Rakyat Merdeka.
- Rumengan, J. (2010). *Metodologi Penelitian Dengan SPSS*. UNIBA Press.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. PT Indeks.

- Siyoto, S. dan M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sucipto. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Penerima Bantuan PNPM-Mandiri Perkotaan Samarinda. *Jurnal Eksis*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, T. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Indeks.
- Torang. (2016). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta.
- Utopo, Ariesto Hadi dan Arief, A. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group.
- Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Gramedia.